

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu disabilitas adalah isu sosial yang penting dan sering diperbincangkan di tingkat global serta nasional. Berdasarkan laporan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mengacu pada data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2021, sekitar 15% penduduk dunia memiliki disabilitas. Dengan data dari Bank Dunia pada akhir tahun 2022 yang menyebutkan jumlah penduduk dunia mencapai sekitar 7,95 milyar orang, maka sekitar 1,2 milyar orang di dunia mengalami disabilitas. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia, dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak pada usia lanjut (Islam et al, 2024: 363).

UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang seperti itu dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Widinarsih, 2019:138).

Salah satu kelompok yang paling rentan adalah anak-anak dengan disabilitas, yang menghadapi tantangan tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada proses belajar dan perkembangan sosial. Kementerian PPPA mendefinisikan 'anak berkebutuhan khusus' sebagai anak-anak yang memiliki keterbatasan atau kondisi yang tidak biasa, baik dari segi fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya (UNICEF, 2023:35). Mereka sering menghadapi hambatan dalam tumbuh kembang, pendidikan, akses layanan kesehatan, dan partisipasi dalam masyarakat. Disamping itu, permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak disabilitas dan para

orang tua adalah pengucilan dan stigmanisa negatif. Stigma negatif yang masih melekat pada disabilitas tetap menjadi penghambat utama bagi penyandang disabilitas dalam meraih potensi penuh mereka serta mengembangkan kontribusi optimal terhadap masyarakat Prihadi et al.,(2020) dalam (Eldiva & Fitra, 2025:30).

Alih-alih terhindar dari stigma dan mendapatkan pemenuhan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB. Empat pilar utama yang menjadi dasar pemenuhan anak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan, dan hak untuk partisipasi. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi hambatan struktural dan stigma sosial yang menghalangi mereka mendapatkan akses yang adil terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, serta fasilitas umum yang memadai UNESCO, (2021) dalam (Eldiva & Fitra, 2025:29).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1), terdapat beberapa jenis kebutuhan khusus yang dikelompokkan sebagai berikut: pertama, disabilitas fisik, yaitu individu yang mengalami gangguan pada kondisi fisiknya; kedua, disabilitas sensorik, yaitu individu yang mengalami gangguan pada salah satu panca indera; ketiga, disabilitas mental, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi berpikir, emosi, dan perilaku; serta keempat, disabilitas intelektual, yaitu individu yang memiliki gangguan pada fungsi kognitif akibat tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata (Widinarsih, 2019 :138).

Menanggapi kebutuhan mereka, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menerapkan program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat setempat, keluarga, serta berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial (Kemensos RI, 2012). Selain itu, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) juga merupakan program pembinaan wilayah dalam hal pencegahan kedisabilitas, mendeteksi dan rehabilitasi/habilitasi segala aspek kehidupan yang memungkinkan untuk meningkatkan integrasi sosial serta memberdayakan segala aspek kehidupan penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat (Novianti & Akbar, 2017:112).

Kegiatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) ini dilaksanakan dengan memperhatikan dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk memungkinkan terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah sosial, keluarga, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) berupaya agar penyandang disabilitas memiliki akses terhadap layanan khusus yang mereka perlukan, sambil tetap berada dalam lingkungan masyarakat yang mendukung, memotivasi, memberikan pendidikan, serta memungkinkan mereka menikmati gaya hidup seperti masyarakat pada umumnya.

Tujuan kedua adalah memberikan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat serta mendorong keterlibatan mereka dalam proses integrasi penyandang disabilitas. Pendidikan masyarakat mengenai penyandang disabilitas yang berkaitan dengan masalah sosial ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan cara-cara penanganannya. Dengan demikian, sikap, harapan, dan tindakan masyarakat dapat berubah sehingga mereka dapat menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan masalah sosial sebagai bagian dari komunitas mereka Novianti & Akbar (2017) dalam Aditya & (Jihan, 2022:124).

Namun, pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) di berbagai daerah belum seragam dan masih banyak mengalami kendala yang serius. Di berbagai lokasi, pelaksanaan masih mengalami kesulitan seperti kekurangan tenaga yang sudah terlatih, dana yang tidak cukup, serta sistem pengawasan yang tidak cukup memadai. Kondisi serupa ditemukan di Kota Tasikmalaya berdasarkan data BPS (2024) mencatat terdapat 263 anak disabilitas, namun layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang diharapkan mendukung kemandirian mereka masih menghadapi keterbatasan, antara lain : psikoterapi yang hanya dilaksanakan satu kali per tahun, minimnya dukungan pemerintah, serta belum adanya wadah pelatihan dan penyaluran bakat anak disabilitas. Psikoterapi sendiri merupakan suatu proses terapi yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau psikiater, untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis, emosional, atau perilaku. Tujuan psikoterapi adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan

kesejahteraan seseorang dengan cara mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak adaptif atau bermasalah.

Selain faktor eksternal tersebut, juga masih ada faktor internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan anak disabilitas, variasi peran keluarga dalam memfasilitasi proses belajar anak, serta belum terbangunnya mekanisme pendampingan yang terstruktur dari komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai penguat peran keluarga melalui layanan psikoterapi dan pendampingan psikososial. Menurut Lepa (2019:3) dalam (Salam et al., 2024:3), peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang, dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga peran itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga sebagai fasilitator utama belajar, serta peran Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai sistem pendukung, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses belajar anak disabilitas dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan nyata anak.

Hingga kini, penelitian mengenai peran keluarga sebagai fasilitator utama proses belajar anak disabilitas dan peran Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai sistem pendukung melalui layanan psikoterapi di tingkat kecamatan, khususnya di Kota Tasikmalaya, masih sangat terbatas. Banyak penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek pelaksanaan program atau studi deskriptif mengenai kondisi penyandang disabilitas, namun belum secara spesifik mengkaji peran keluarga dan Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas.

Dalam upaya mendukung keberlangsungan program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), pemahaman terhadap peran yang terlibat menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan observasi awal, proses belajar anak disabilitas masih sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas keluarga, sementara RBM lebih banyak berperan dalam pendampingan psikoterapi, psikologis dan sosial anak, yang secara tidak langsung memengaruhi kesiapan dan keberlanjutan proses belajar anak. Kondisi ini tercermin dari keterbatasan variasi bentuk dukungan yang

tersedia, seperti layanan psikoterapi yang dilaksanakan secara terbatas, dominasi layanan administratif, serta belum adanya program pendukung pembelajaran, pendidikan inklusif, dan wadah pengembangan minat dan bakat anak disabilitas. Situasi tersebut menegaskan pentingnya mengkaji bagaimana peran keluarga dan RBM dijalankan dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas di tingkat komunitas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan karena mengkaji secara mendalam peran orang tua sebagai fasilitator utama belajar anak disabilitas serta peran Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai sistem pendukung dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana orang tua memfasilitasi proses belajar anak disabilitas, serta bagaimana RBM berperan sebagai pendukung melalui layanan psikoterapi, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian karena proses belajar anak disabilitas tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua sebagai lingkungan terdekat serta peran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai sistem pendukung di tingkat komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dan RBM dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas, baik dalam bentuk pendampingan, dukungan emosional, maupun penyediaan akses terhadap layanan yang tersedia. Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik menelaah peran orang tua dan Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas di tingkat kecamatan masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks daerah seperti Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan dan penguatan peran RBM yang lebih inklusif di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi orang tua, RBM, serta para pendamping dalam memahami pola fasilitasi proses belajar anak disabilitas, sehingga upaya peningkatan kemandirian dan integrasi sosial anak disabilitas dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan

kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Peran orang tua dan Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dalam Memfasilitasi Proses Belajar Anak Disabilitas.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan analisis masalah yang dipaparkan sebelumnya, perumusan masalahnya yaitu bagaimana peran orang tua dan Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya?.

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memfokuskan penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil tiga teori dan membatasi penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Peran

Teori peran menjelaskan cara orang-orang berinteraksi dalam masyarakat dengan menggunakan istilah-istilah tentang bagaimana setiap individu memainkan peran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh budaya. Menyinggung teori peran di atas, maka penelitian ini akan menekankan kedalam dua jenis peran untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memfasilitasi kebutuhan anak disabilitas:

- a. Peran orang tua : dalam konteks ini, orang tua berperan sebagai fasilitator utama dalam memfasilitasi kebutuhan belajar anak disabilitas.
- b. Peran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) : dalam hal ini, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) berperan sebagai pendamping dan lebih berfokus pada pelayanan psikoterapinya saja.

1.3.2 Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah suatu pendekatan rehabilitasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan individu dengan disabilitas. Pendekatan ini menekankan keterlibatan orang tua, lingkungan sosial, serta sumber daya lokal untuk mendukung proses rehabilitasi secara menyeluruh, tidak hanya dari segi medis tetapi juga sosial, ekonomi, dan psikologis.

Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, mulai berjalan sejak tahun 2019 atas prakarsa Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU). Program ini memberikan layanan *psikoterapi*, bantuan administrasi, serta penyediaan alat bantu bagi anak disabilitas. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dikelola oleh 20 orang kader yang berasal dari kader Posyandu di 8 kelurahan dalam kecamatan tersebut. Struktur organisasinya terdiri atas *Steering Committee* (ketua, sekretaris, dan bendahara), Bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan, Bidang Advokasi, dan Layanan Pendamping. Setiap bidang tersebut dikelola oleh 6 orang kader.

1.3.3 Fasilitasi Proses Belajar

Fasilitasi belajar adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pihak yang berperan dalam lingkungan terdekat anak (khususnya orang tua dan pendamping) untuk menyediakan, mengarahkan, dan mendukung proses belajar anak agar dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak. Fasilitasi belajar mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti penyediaan sarana dan prasarana belajar, pendampingan dalam mengerjakan tugas, pemberian motivasi, pengaturan waktu belajar, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Fasilitasi ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan sosial yang membantu anak dalam memahami materi pembelajaran dan mengembangkan potensi dirinya.

Fasilitasi belajar dalam penelitian ini berfokus pada dukungan yang diberikan orang tua dalam proses belajar anak penyandang disabilitas yang tergabung dalam program RBM Kecamatan Mangkubumi.

1.3.4 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang bersifat jangka panjang dan dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain.

Disabilitas dapat meliputi berbagai kondisi, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas, kognitif, atau gangguan perkembangan lainnya.

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi aksesibilitas, kesempatan pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi sosial.

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini berfokus pada anak disabilitas dengan total anak disabilitas mencapai 90 orang. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada anak penyandang disabilitas fisik dengan kategori disabilitas tuna wicara, tuna rungu, *Cerebral palsy* dan Tuna Daksa, dalam program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kecamatan Mangkubumi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dan Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian mengenai peran orang tua dan Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peranan keluarga menurut Stephen R. Covey (1989) yang menempatkan keluarga sebagai pendidik utama, pembentuk karakter, serta sumber dukungan emosional dalam proses belajar anak disabilitas.

Selain itu, penelitian ini menguatkan konsep peran RBM sebagaimana dirumuskan dalam buku panduan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dengan mengkaji implementasinya dalam konteks pembelajaran anak disabilitas di tingkat komunitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kesesuaian maupun kesenjangan antara peran ideal orang tua dan RBM dengan praktik yang dijalankan di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang lebih berfokus pada penguatan peran orang tua dan komunitas dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas fisik. Diharapkan,

pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, termasuk dalam pengalokasian anggaran, peningkatan kapasitas kader RBM, serta penguatan sinergi lintas sektor (pendidikan, sosial, dan kesehatan) untuk mendukung hak pendidikan anak disabilitas.

b. Pendamping atau Kader

Bagi pengelola dan kader RBM, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami dan memperkuat peran mereka bersama orang tua dalam memfasilitasi proses belajar anak disabilitas fisik. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pendampingan yang lebih terstruktur, seperti pendampingan orang tua, adaptasi metode belajar, pemanfaatan alat bantu, serta penciptaan lingkungan belajar yang ramah disabilitas.

c. Masyarakat dan orang tua

Bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya peran orang tua dan komunitas dalam mendukung proses belajar anak disabilitas fisik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua bahwa keterlibatan aktif dalam pendampingan belajar merupakan faktor penting dalam perkembangan anak. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, mendukung keberadaan RBM, serta mengurangi stigma terhadap anak disabilitas fisik.